

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Anggaran di sektor publik disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan melalui peraturan daerah dalam satu tahun anggaran. Sebelum menjadi anggaran yang disahkan, APBD adalah sebuah rancangan rencana kerja pemerintah daerah yang dibuat agar tercapainya tujuan bernegara. Penyusunan rencana kerja dalam rancangan APBD dilakukan setahun sebelum pelaksanaannya, maka kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian selama tahun berjalan. Dalam satu periode anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat menangkap kebutuhan suatu organisasi sehingga dimungkinkan untuk dilakukan perubahan anggaran (*rebudgeting*) (Abadiarti, 2014).

Perubahan anggaran (*rebudgeting*) adalah konsekuensi atas terjadinya perbedaan antara jumlah anggaran yang direncanakan sebelumnya dengan yang dibutuhkan pada kondisi terkini. Perubahan rincian anggaran disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanja. Anggaran belanja yang telah disusun perlu direvisi kembali agar tepat tujuan dan sasaran sehingga tercipta anggaran yang efektif (Abadiarti, 2014). Hal ini diharapkan agar pemerintah dapat melakukan perhitungan yang efektif terhadap potensi penerimaan daerah terhadap APBD agar tidak terjadinya kegagalan dalam tingkat penyerapan anggaran terhadap program anggaran yang sudah direncanakan.

Melalui tingkat penyerapan anggaran dapat diketahui gambaran mengenai perubahan anggaran belanja terjadi karena rendahnya potensi penerimaan daerah untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan pengeluaran atau belanja daerah dalam satu periode anggaran. Berikut ini adalah serapan APBD yang dalam hal ini adalah serapan anggaran belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Muba

untuk tahun anggaran 2017-2021 yang diperoleh dari hasil pencatatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan.



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.1
Grafik Penyerapan Anggaran Belanja Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021

Berdasarkan Grafik diatas dapat dinyatakan bahwa anggaran belanja Kabupaten Musi Banyuasin selama lima tahun tidak pernah mencapai angka seratus persen. Hal ini merupakan kurang efektifnya jumlah penetapan anggaran terhadap keadaan sebenarnya (realisasi) yang terdapat di salah satu Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Suatu kondisi yang menunjukkan kegagalan untuk mengendalikan anggaran tersebut yang berpotensi dapat menyebabkan surplus anggaran atau defisit anggaran, dimana anggaran pengeluaran melebihi anggaran penerimaan (Herianti, 2019).

Selisih antara anggaran belanja daerah dan juga realisasinya disebut dengan varians anggaran belanja, varians anggaran belanja yang besar pada tahun lalu diikuti oleh perubahan anggaran belanja pada tahun berjalan (Novelsyah, dkk, 2022). Jika selisih anggaran pengeluaran melebihi anggaran penerimaan maka disebut dengan SILPA. Semakin besar tingkat perubahan SILPA, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan perubahan anggaran belanja daerah

(Kurniawan dan Arza, 2019). SILPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus menjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran.

Salah satu sumber penerimaan suatu pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan meningkatnya PAD maka dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan ke dalam kegiatan maupun pengeluaran yang memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah (Rizqiyati, dkk, 2019). PAD dapat menjadi salah satu indikator tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Suatu daerah dianggap memiliki tingkat kemandirian yang tinggi apabila mampu melewati *fiscal stress* atau tekanan fiskal (keuangan) karena tidak lagi memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat (Kurniawan dan Arza, 2019). Semakin tinggi tingkat *fiscal stress*, maka semakin kecil perubahan anggaran belanja, Hal ini menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress*, memiliki keleluasaan dalam penyesuaian anggaran yang rendah (Junita dan Abdullah, 2016)

Beberapa penelitian mengenai perubahan anggaran belanja daerah yaitu Penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Arza, (2019) yang menguji Pengaruh *fiscal stress*, varians anggaran dan perubahan SILPA terhadap perubahan anggaran belanja. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya perubahan SILPA yang berpengaruh positif dan signifikan sedangkan varians anggaran dan *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja. Penelitian ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Novelsyah, dkk, (2022) yang menguji model prediksi perubahan anggaran belanja daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa bahwa Varians Pendapatan, Varians Belanja dan Akumulasi Surplus berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah, sedangkan variabel Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya varians anggaran akan dimanfaatkan untuk melakukan perubahan anggaran.

Penulis membuat penelitian ini berdasarkan replikasi dari penelitian sebelumnya, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan pada variabel dan objek penelitian sebelumnya yaitu *pertama* penelitian dilakukan di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan. *kedua* Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu menggunakan variabel diantaranya SILPA, Varians Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan *Fiscal stress*. *Ketiga* Penelitian ini secara khusus mengambil sampel pemerintahan Kabupaten Dan Kota di Sumatera Selatan dengan menggunakan data *time series* dari tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah perubahan SILPA berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Varians Anggaran Belanja berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah *Fiscal stress* berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah perubahan SILPA, Varian Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan *Fiscal stress* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini berfokus dan tidak meluas . Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan SILPA, Varians anggaran belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan *Fiscal stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja. Penelitian dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan sebagai entitas pelaporan pemerintah pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai . Di dalam penelitian ini memiliki yang menjadi tujuan penulis adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan SILPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Varian Anggaran Belanja terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Fiscal stress* terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh perubahan SILPA, Varians Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan *Fiscal stress* secara bersama-sama terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Tentunya penelitian akan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penulis mengharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh perubahan SILPA, Varians Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah, dan *Fiscal stress* secara bersama-sama terhadap Perubahan Anggaran Belanja di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
2. Dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori ,terutama yang berkaitan dengan perubahan SILPA, Varian Anggaran Belanja, Pendapatan Asli Daerah, *Fiscal stress* dan Perubahan Anggaran Belanja.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penganggaran yang ada, sehingga masyarakat dapat mengkritisi semua kegiatan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran.
4. Sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan dan membantu pemerintah untuk membuat kebijakan lainnya tentang APBD di berbagai kabupaten dan kota provinsi Sumatera Selatan.
5. Dapat digunakan sebagai acuan peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perubahan anggaran belanja pada pemerintah daerah.